

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan pada penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi :

1. Hermawan Soebagio (2005)

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional”. Dependen Variabel adalah Non-Performing Loan dengan Independen Variabel adalah Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, Gross Domestik Produk (GDP), Capital Adequasy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Tingkat Suku Bunga Kredit dan Loan Deposit Ratio (LDR). Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitiannya adalah Nilai Kurs, Inflasi KAP, Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Loan*, GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Non-Performing Loan* dan CAR serta LDR mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *Non-Performing Loan*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional, sedangkan perbedaannya adalah :

1. Pada penelitian ini indikator mikroekonomi yang digunakan ada empat yaitu kurs CAR, KAP, tingkat suku bunga kredit dan LDR, sedangkan peneliti akan meneliti hanya menggunakan dua indikator mikroekonomi yang meliputi, portofolio kredit dan CAR.
2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2000–2004 sedangkan peneliti menggunakan periode penelitian dari tahun 2010-2014.

2. Syeda Zaben Ahmed (2006)

Dalam penelitian yang berjudul “*An Investigation of The Relationship between Non-Performing Loans, Macroeconomic Factors, and Financial factors in Context of Private Commercial Bank in Bangladesh*”. Dependen Variable adalah *Non-Performing Loan*, Independen Variable adalah *Gross Domestic Product, Economic Condition, Bank Lending Rate, Horizon of Maturity of Credit, Collateral Value Againsts Loan, Bank Size, Banks’ Credit Culture* dan *Bank’s Credit to Priority Sector*. Penelitian menggunakan model korelasi dan regresi. Hasil dari penelitian tersebut adalah *bank lending rate, collateral value against loan, bank size* dan *banks’ credit culture* berpengaruh negatif terhadap *non performing loan*. Sedangkan *gross domestic product, horizon of maturity of credit* dan *bank’s credit to priority sector* berpengaruh positif terhadap *non performing loan*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel dependen yang digunakan adalah Non-Performing Loan (NPL), sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi Gross Domestic Product (GDP), Economic Condition, Bank

Lending Rate, sedangkan peneliti menggunakan variabel makroekonmi meliputi Gross Domestic Product (GDP), BI rate dan nilai tukar / kurs.

3. Rahmawulan (2008)

Rahmawulan (2008) dalam tesisnya yang berjudul “Perbandingan Faktor Penyebab Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Finance (NPF)”, mencoba mencari faktor-faktor yang mempengaruhi NPL/NPF dengan menggunakan variabel GDP, Inflasi, SBI/SWBI, Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan, LDR/FDR. Penelitian ini menggunakan analisis *Impulse Response Function* dan regresi majemuk dengan mempertimbangkan faktor *lag*, sehingga diperoleh variabel-variabel signifikan yang mempengaruhi NPL/NPF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit / pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kredit bermasalah. Baik NPL maupun NPF merespon positif terhadap perubahan GDP dan *inflasi*. Variabel LDR berpengaruh negative terhadap NPL akan tetapi FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan SBI berpengaruh positif terhadap NPL, akan tetapi sebaliknya, SWBI direspon negatif oleh NPF.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non-Performing Loan (NPL) dan juga variabel yang digunakan adalah variabel makroekonomi dan mikroekonomi, sedangkan perbedaannya adalah :

1. Pada penelitian ini sample penelitian yang digunakan adalah kelompok perbankan konvensional dan perbankan syariah, sedangkan peneliti hanya menggunakan sample kelompok perbankan konvensional.

2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2003–2007 sedangkan peneliti menggunakan periode penelitian dari tahun 2010-2014.

4. Simon (2010)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dampak Terjadinya *Shock* Variabel Moneter Terhadap *Non Performing Loan Ratio* di Indonesia” mencoba menganalisis dampak terjadinya *shock* variabel moneter terhadap rasio NPL di Indonesia. Studi empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara *BI rate*, inflasi, nilai tukar, terhadap rasio NPL. Uji kausalitas Granger menunjukkan terjadinya *bidirectional causality* antara NPL dan *BI rate* serta *BI rate* dan inflasi. Selain itu, *unidirectional causality* juga terjadi antara inflasi dan nilai tukar terhadap NPL. *Vector Auto Regression* (VAR) juga memberikan hasil yang mendukung hipotesis awal bahwa *shock* variabel moneter memiliki pengaruh yang kecil terhadap NPL. Hasil estimasi VAR dapat dilihat dari uji *Impulse Response* dan *Variance Decomposition*. Hasil *Impulse Response* menunjukkan bahwa terjadinya *shock* pada inflasi dan nilai tukar memberikan dampak positif terhadap perubahan NPL. Namun, di lain pihak NPL justru merespon negatif ketika terjadi *shock* pada suku bunga acuan. Hasil *Variance Decomposition* menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga acuan (*BI rate*) memiliki kontribusi yang paling besar jika dibandingkan dengan kontribusi nilai tukar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama sama menggunakan variabel moneter dan melakukan analisis hubungan variabel moneter terhadap NPL, sedangkan perbedaannya adalah variabel moneter yang digunakan penelitian ini meliputi *BI Rate*, Inflasi dan nilai

tukar, sedangkan variabel moneter yang digunakan peneliti meliputi GDP, BI rate dan nilai tukar.

5. B.M Misra dan Sarat Dahl (2010)

Melakukan penelitian yang berjudul “*Pro-cyclical Management of Banks’ Non-Performing Loans by the Indian Public Sector Banks*”. Dependen Variable adalah *Gross Non-Performing Loan*, Independen Variable adalah *Loan Interest, Cost Burden of Bank, Collateral, Loan Maturity, Credit Orientation, Policy Rate, Regulation Capital Requirement, Business Cycle, Loan Default, Bank Size, Loan Deposit Ratio, Non-Interest Income* dan *Gross Domestic Product*. Penelitian menggunakan model regresi berganda, hasil penelitiannya adalah *loan interest, cost burden of bank, credit orientation, policy rate, loan default, bank size, credit deposit ratio, non-interest income* dan *gross domestic product* berpengaruh positif terhadap *gross non-performing loan*. Sedangkan *collateral* dan *loan maturity* berpengaruh negatif terhadap *gross non-performing loan*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel dependen yang digunakan adalah Non-Performing Loan (NPL). Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independen meliputi *Loan Interest, Cost Burden of Bank, Collateral, Loan Maturity, Credit Orientation, Policy Rate, Regulation Capital Requirement, Business Cycle, Loan Default, Bank Size, Loan Deposit Ratio, Non-Interest Income* dan *Gross Domestic Product*, sedangkan peneliti menggunakan variabel independen meliputi GDP, BI Rate dan nilai tukar (kurs).

6. Anin Diyanti (2012)

Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan variabel independennya adalah *Bank Size*, *CAR*, *GDP*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Inflasi*. Dengan menggunakan model regresi linear berganda maka hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bank Size*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP)* dan *Laju Inflasi* berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Loan (NPL)*.

Persamaan penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya *Non Performing Loan*, sedangkan perbedaannya adalah :

Penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi *Gross Domestic Product (GDP)* dan *inflasi* sedangkan peneliti menggunakan variabel makroekonomi meliputi *Gross Domestic Product (GDP)*, *BI rate* dan *nilai tukar / kurs*.

Penelitian ini menggunakan sampel kelompok Bank Umum Konvensional yang menyediakan layanan kredit pemilikan rumah (KPR), sedangkan peneliti menggunakan sampel Bank Umum Swasta (Devisa) kelompok bank buku 3 dengan kepemilikan modal inti Rp. 5 triliun sd Rp. 30 triliun.

Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2008–2011 sedangkan peneliti menggunakan periode penelitian dari tahun 2010-2014.

7. Muhamad Taufik Akbar (2012)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap *Non-Performing Loan* Bank Umum Tbk di Indonesia (periode 2007 – 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan variabel independennya meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR), Bank Size (SIZE), Loan to Asset Ratio (L_A), Pertumbuhan GDP (Growth) dan Inflation (INF). Model yang digunakan adalah regresi data panel (Pooled Data) menggunakan Fixed Effect Model. Hasil penelitiannya adalah Inflasi dan LAR berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Loan* dan GDP dan Bank SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non-Performing Loan*, sedangkan CAR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *Non-Performing Loan*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Non-Performing Loan (NPL)* pada Bank Umum di Indonesia dan juga sama sama menggunakan indikator makroekonomi, sedangkan perbedaannya adalah :

1. Pada penelitian ini indikator makroekonomi yang digunakan ada dua yaitu GDP dan inflasi, sedangkan peneliti akan menggunakan tiga indikator makroekonomi yang meliputi : GDP, BI rate dan nilai tukar/kurs.
2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2007–2011 sedangkan peneliti menggunakan periode penelitian dari tahun 2010-2014.

8. Tegar Setiafandy (2014)

Dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Makroekonomi Terhadap NPL KPR (Studi Kasus Pada Bank Umum Periode 2010-2013)”. Hasil analisis pengaruh kinerja keuangan dan makroekonomi terhadap NPL KPR dapat diketahui bahwa variabel bebas yang tercermin didalam kinerja keuangan yang meliputi *Bank Size*, LDR, CAR, dan makroekonomi yang meliputi GDP, Inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rasio NPL KPR Bank Umum selama periode tahun 2010-2013. Secara parsial variabel *Bank Size* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio NPL KPR bank umum selama periode 2010-2013, dapat diartikan variabel *Bank Size* bukan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi rasio NPL KPR bank umum. Sedangkan LDR, CAR, dan, Inflasi menunjukan pengaruh positif signifikan terhadap NPL KPR bank umum selama periode 2010-2013, dapat diartikan bahwa LDR, CAR, dan, Inflasi mempunyai hubungan yang kuat terhadap terjadinya NPL KPR bank umum. Dan juga GDP menunjukan pengaruh negatif signifikan terhadap NPL KPR bank umum selama periode 2010-2013, dapat diartikan bahwa GDP tidak terlalu memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya NPL KPR bank umum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan dan variabel makroekonomi terhadap NPL, sedangkan perbedaannya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan sampel kelompok Bank Umum Konvensional yang menyediakan layanan kredit pemilikan rumah (KPR), sedangkan peneliti

menggunakan sampel Bank Umum Swasta (Devisa) kelompok bank buku 3 dengan kepemilikan modal inti Rp. 5 triliun sd Rp. 30 triliun.

2. Pada penelitian ini indikator makroekonomi yang digunakan ada dua yaitu GDP dan inflasi, sedangkan peneliti akan menggunakan tiga indikator makroekonomi yang meliputi : GDP, BI rate dan nilai tukar/kurs.
3. Pada penelitian ini rasio kinerja keuangan yang digunakan meliputi *Bank Size*, *Loan Deposit Ratio* (LDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sedangkan yang digunakan oleh peneliti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan portofolio kredit.

2.2 Landasan Teori

Berikut ini beberapa teori yang digunakan untuk mendukung peneliti dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya :

2.2.1 Asymmetric Information & Moral Hazard

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri seperti manajer, karyawan, serikat buruh dan lainnya. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat). Para pengguna internal (para manajemen) mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang tidak berada di perusahaan secara langsung, tidak mengetahui informasi tersebut sehingga tingkat ketergantungan manajemen terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Salah satu kendala yang akan muncul antara *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*).

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent* menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management*, (Rahmawati, dkk. 2006).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada *principal*.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan

Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan bahwa *agent* berada pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Sehingga dalam kondisi semacam ini *principal* seringkali pada posisi yang tidak

diuntungkan. Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, *agent* juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Dengan adanya kondisi yang asimetri, maka *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

2.2.2 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah, lalu istilah ini berubah populer dan resmi menjadi bank (Hasibuan, 2006). Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Bank. Bank Umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara

lengkap adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : surat wesel, surat pengakuan utang . Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai 1 tahun, instrumen surat berharga lain berjangka waktu sampai 1 tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah (transfer).
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (kegiatan : inkaso dan kliring).
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
17. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut :

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasar prinsip syariah
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas perbankan.

Secara umum, fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediasi*). Secara spesifik fungsi bank di bagi menjadi tiga yaitu :

1. *Agent of trust* yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan.
2. *Agent of development* yaitu memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.
3. *Agent of service* yaitu bermacam-macam jasa yang ditawarkan oleh bank

Pada dasarnya suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

1. Dana sendiri
2. Dana dari depositan
3. Dana pinjaman

4. Sumber dana lain

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa-jasa. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan bentuk jasa bank yang saat ini ada antara lain adalah :

1. Kiriman uang (transfer), artinya jasa pengiriman uang lewat bank.
2. Kliring (clearing), artinya penagihan warkat (surat surat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota.
3. Inkaso (collection), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4. Kartu kredit atau ATM atau bank card.
5. Letter of Credit (L/C), artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk.
6. Cek wisata (trevellers cheque) artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan.
7. Kegiatan lain-lainnya.

2.3 Pengertian Kredit

Bank melakukan pengelolaan uang masyarakat dan memutarkannya dalam berbagai macam investasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut (Susilo dkk., 2006), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu tertentu yang dalam pembayarannya akan disertakan adanya tambahan berupa bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman. Bahwa didalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta imbalan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai risiko yang ditanggung jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2005)

1. Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun

eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka panjang menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Hasibuan (2006), agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit, sebagai salah satu produk perbankan, harus diprogram dengan baik dan benar. Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.
2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat Tbunga kredit yang diharapkan.
3. Kehati-hatian, yaitu besar *plafond* kredit (*Legal Lending Limit* atau Batas Minimum Pemberian Kredit)
4. Kebijakan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Dalam melakukan penilaian kredit, pejabat kredit secara umum menggunakan prinsip-prinsip penilaian kredit yang disebut dengan 5C. Prinsip prinsip kredit tersebut adalah sebagai berikut : (Riyadi, 2004)

1. *Character*, penilaian yang didasarkan pada itikad baik dari calon debitur.
2. *Capacity*, penilaian yang didasarkan pada kemauan nasabah untuk melunasi kewajiban dan bungannya.
3. *Capital*, penilaian yang didasarkan pada modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah.
4. *Collateral*, penilaian yang didasarkan pada barang atau jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

5. *Condition*, penilaian yang didasarkan pada kondisi lingkungan perusahaan itu berada.
6. *Constrains*, penilaian yang didasarkan pada kemungkinan timbulnya hambatan yang sudah dapat diprediksi.

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 januari 2005 kepada semua Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut kinerja, prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

Kualitas kredit ketentuan secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut :
(Simorangkir, 2004)

1. Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Sebagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang jadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari .
Sering terjadi cerukan
- b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
Frekuensi relative rekening relatif rendah
Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

2.3.1 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan masalah yang paling sering dihadapi oleh Bank yang memiliki fungsi sebagai penyalur dana, tentunya akan memiliki risiko kredit. Menurut Bessis (1999) risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian akibat kegagalan pembayaran oleh peminjam (debitur), atau terjadinya kemerosotan kualitas kemampuan membayar utang pihak debitur.

Basel Committee (1999) menjelaskan bahwa bagi sebagian bank, pemberian kredit merupakan sumber utama dari risiko kredit. Namun risiko kredit dapat juga disebabkan oleh berbagai aktivitas dan instrumen keuangan bank, seperti transaksi antar bank, *trade financing*, transaksi mata uang asing, *swaps*, maupun *bonds*.

Karena risiko kredit terus menjadi sumber utama masalah bagi bank bank di seluruh dunia, bank dan pengawas yaitu Bank Indonesia harus dapat mengambil langkah langkah antisipasi untuk mengatasi hal ini. Bank harus memiliki kesadaran dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit. Selain itu, bank juga diharuskan memiliki permodalan yang memadai sehingga dapat menyangga potensi terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit (Basel Committee, 1999).

2.3.2 Non-Performing Loan (NPL)

Menurut ketentuan Bank Indonesia terdapat tiga kelompok kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*) adalah sebagai berikut : (Kuncoro dan Suhardjono, 2002)

1. Kredit kurang lancar (*substandard*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
2. Kredit Diragukan (*doubtful*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
3. Kredit Macet (*loss*) dengan kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
 - d. pada nilai wajar.

Status NPL pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa pembayaran bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Dengan kata lain, tingginya NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan Bank dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar (Djohanputro dan Kountur, 2007).

Bank Indonesia telah menentukan untuk *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 5%. Apabila Bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

2.3.3 Portofolio Kredit

Portofolio didefinisikan sebagai pembagian atau penyebaran pada beberapa sektor guna meminimalisasi risiko yang dapat terjadi. Ini berlaku baik untuk sekuritas, industri, maupun penyebaran pada bagian lainnya. Selain itu Portofolio dapat diartikan sebagai studi tentang seorang investor individual mencapai pengembalian maksimum yang diharapkan dari portofolio yang berbeda-beda di mana masing-masing mempunyai tingkat risiko tertentu.

Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit(*loan*). Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi *primary reserve* serta kebutuhan *secondary reserve*-nya, bank dapat menentukan besarnya volume

kredit yang akan diberikan. Dalam praktek perbankan di Indonesia, dengan memperlihatkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral (BI) sebagai pembina dan pengawas bank umum, penentuan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. *Reserve requirement* (RR) adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk GWM berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
2. *Loan to deposit ratio* (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana bank dari berbagai sumber.
3. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit (baik kepada nasabah tunggal maupun kepada grup) yang besarnya melebihi 20 % dari besarnya modal bank yang bersangkutan.

Ketiga ketentuan perbankan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberanian para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang tinggi. Suatu hal yang patut diingat adalah bahwa pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit (Dendawijaya, 2000).

Pada penelitian ini tingkat portofolio kredit digambarkan dengan rasio total kredit yang diberikan dibagi dengan total aset sebagai ukuran Loan to Aset Ratio.

Loan to Asset Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah

portofolio kredit yang dimiliki oleh suatu bank dengan total aset yang dimiliki. Bank dengan tingkat portofolio kredit yang tinggi akan memiliki resiko yang tinggi pula, sehingga kemungkinan masalah kredit macet sangat mungkin terjadi. Menurut Jimenez et.al (2007) bank yang cenderung menjaga tingkat portofolio kredit memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan bank dengan tingkat portofolio kredit yang tinggi.

2.3.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Suatu kesepakatan pertama pada tahun 1988 adalah tentang “ketentuan permodalan“ dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko (Muchdarsyah Sinungan, 2000:160) . CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Lukman Dendawijaya, 2009:121). Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan

modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%.

2.3.5 Gross Domestic Product

Gross domestic product (GDP) digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen yang ada dalam (GDP) yaitu pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih *ekspor – import*. Stiglitz dan Walsh (2006) menjelaskan bahwa GDP menyediakan penilaian terbaik untuk mengukur tingkat produksi. Akan tetapi perubahan sifat dasar produksi dari bentuk pertumbuhan dalam *underground economy* menjadi bentuk inovasi teknologi baru bisa memengaruhi kemampuan GDP untuk menyediakan gambaran yang akurat mengenai kinerja ekonomi. Lebih jauh GDP menggambarkan keseluruhan tingkat aktivitas ekonomi dalam sebuah negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk sebuah pasar. Hal itu menunjukkan bahwa *Gross domestic product* (GDP) adalah indikator dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran penting dalam menjelaskan kinerja ekonomi yang secara langsung merupakan kinerja dari pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa termasuk industri perbankan.

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan *cash flow* bank dengan cara meningkatkan permintaan pembiayaan oleh perusahaan dan rumah tangga. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat permintaan pembiayaan cenderung meningkat. Karena pembiayaan cenderung menghasilkan keuntungan lebih baik dari pada investasi surat-surat berharga, maka *expected cash flow* akan lebih tinggi. Alasan lain dari tingginya *cash flow* adalah semakin sedikit tingkat risiko

default yang terjadi selama masa pertumbuhan ekonomi yang kuat (Madura, 2006). Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar. Sementara itu ketika GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggelihat, sehingga *non performing loan (NPL)* turun (Nasution, 2007). Berdasarkan tulisan (Davis dan Zhu, 2008) antara lain mengemukakan bahwa pertumbuhan GDP mempunyai dampak terhadap kualitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Lebih jauh dikemukakan bahwa apabila suatu perekonomian mengalami penurunan dalam arti pertumbuhan GDP negatif, maka hal ini akan berdampak pada memburuknya kualitas perbankan. Fenomena ini seperti tersebut diatas dapat dilihat ketika pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada menurunnya kegiatan di sektor rill (sebagian dibiayai oleh kredit bank) sehingga menyebabkan kredit yang diberikan bermasalah.

2.3.6 BI Rate

BI Rate adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia mengenai suku bunga, yang diumumkan kepada publik yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter. BI Rate diumumkan di setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesiadan, nantinya kebijakan ini akan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter

dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Diharapkan dari adanya pergerakan suku bunga PUAB akan diikuti oleh pergerakan suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan suku bunga lainnya (Bank Indonesia, 2013). Kenaikan BI Rate yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit bank dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah sebab beban bunga yang harus ditanggung debitur akan semakin berat.

Dengan kondisi tersebut maka debitur akan cenderung mencari bunga yang lebih rendah saat melakukan pinjaman, maka saat suku bunga kredit bank konvensional naik akibat kenaikan BI Rate maka debitur akan memilih opsi lain yakni melakukan pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah yang biaya dananya dianggap lebih rendah dibandingkan bunga bank konvensional yang sedang meningkat.

2.3.7 Nilai tukar (kurs)

Nilai tukar atau dikenal pula sebagai kurs dalam keuangan adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

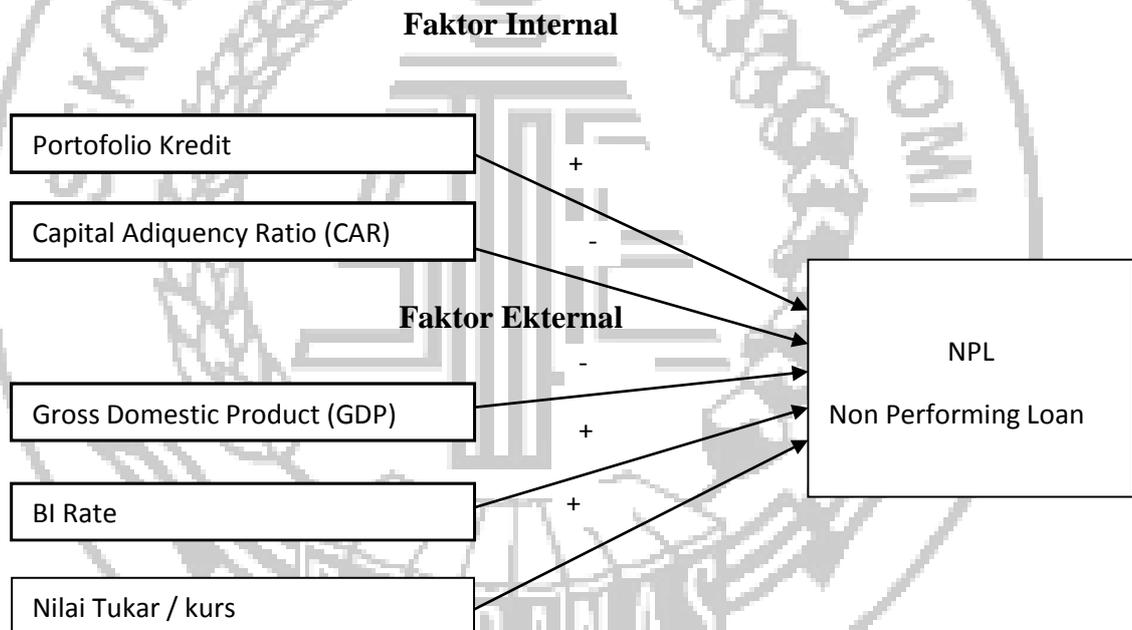
Fluktuasi nilai tukar mengakibatkan bank devisa mengalami kesulitan. Kewajiban dalam bentuk valas sering tidak dilindungi nilaikan. Bank juga sering memberikan pinjaman dalam bentuk valas kepada perusahaan yang tidak menghasilkan devisa. Akibatnya depresiasi nilai tukar telah membengkakkan kewajiban bank disatu pihakdan Non Performing Loan makin naik di pihak lain. Faktor kurs nilai tukar semakin besar pengaruhnya terhadap debitur yang meminjam kredit dalam mata uang asing dan memasarkan produk mereka didalam

negeri dengan harga dalam rupiah. Hal ini menyebabkan beban bunga dan pembayaran kembali kredit meningkat sampai diluar batas debitemnya.

Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin menurunnya nilai tukar mata uang (melemah) mengakibatkan kemampuan untuk membayar kewajiban kembali kredit dan bunganya juga menjadi rendah sehingga NPL akan menjadi meningkat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi NPL sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Non Performing Loan : variabel *dependent*

Variabel 1,2,3,4, dan 5 : variabel *independent*

—————> : mempengaruhi

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan beberapa penelitian sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 : Portofolio Kredit berpengaruh positif terhadap NPL

Beberapa penelitian menghasilkan bahwa tingkat portofolio kredit memiliki hubungan dengan NPL. Bank yang memiliki tingkat portofolio kredit yang tinggi maka akan memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. Dan di sisi lain semakin tinggi portofolio kredit dari suatu bank maka akan semakin tinggi pula return yang akan di dapatkan sesuai dengan slogan “ *High risk, high return*”.

Pada penelitian ini tingkat portofolio kredit digambarkan dengan rasio Loan to Asset (L_A). Seperti hasil penelitian dari Muhamad Taufik Akbar (2012) bahwa Loan to Asset (L_A) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable NPL, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : Loan to Asset (L_A) berpengaruh positif terhadap NPL.

2. Hipotesis 2: CAR berpengaruh negatif terhadap NPL

Modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Capital adequency ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk

keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan penyaluran kredit.

Bank yang memiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi cenderung dikelola secara hati-hati. Artinya CAR merupakan faktor kunci yang menentukan apakah moral hazard dapat dihindari atau tidak. Makin tinggi CAR, makin rendah terjadinya pihak bank menyalahgunakan pembiayaan yang dapat berimbas menaikkan tingkat NPL.

Bank Indonesia menyatakan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Hermawan Soebagio (2005) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : CAR berpengaruh negatif terhadap NPL.

3. Hipotesis 3 : GDP berpengaruh negatif terhadap NPL

Menurut McEachern (2000), GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan GDP yang dalam hal ini tingkat pertumbuhan GDP adalah pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Putong dalam Soebagio (2005), pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil (sesuai dengan teori Keynes). Tetapi manakala perekonomian mengalami krisis, maka konsumsi akan meningkat dikarenakan harga barang yang naik dan kelangkaan barang di pasar serta menurunkan tingkat tabungan masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap lembaga perbankan.

Peningkatan konsumsi swasta yang diiringi dengan penurunan tingkat investasi dan penurunan PDB riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima dari perbankan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tegar Setiafandy (2014) yang menyatakan bahwa GDP tidak terlalu memiliki pengaruh kuat terhadap terjadinya NPL, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut GDP mempunyai pengaruh negatif terhadap NPL.

4. Hipotesis 4 : BI Rate berpengaruh positif terhadap NPL

Kebijakan mengenai BI Rate erat kaitannya dengan suku bunga, penentuan suku bunga harus memperhatikan dan menganalisis komponen-komponen yang menentukan tingkat suku bunga kredit, yang pertama yaitu total biaya dana (*Cost of fund*), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito, yang kedua *Overhead Cost* merupakan seluruh biaya (diluar biaya dana) yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kredit yang disalurkan bank memiliki tingkat risiko tertentu, semakin tinggi tingkat risiko kredit semakin tinggi pula suku bunga yang diminta bank. Dengan adanya kenaikan BI Rate maka secara langsung berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga bank. Dengan adanya peningkatan suku bunga maka akan memperburuk kualitas dari pinjaman, atau dengan kata lain semakin tingginya biaya kredit membuat debitur semakin sulit membayarkannya. Dan

semakin banyaknya debitur yang tidak mampu membayarkan pinjamannya memberikan konsekuensi kenaikan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahmawulan (2008) yang menyatakan bahwa SBI berpengaruh positif terhadap NPL, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut BI Rate berpengaruh positif terhadap NPL.

5. Hipotesis 5 : Nilai tukar (kurs) berpengaruh positif terhadap NPL

Nilai tukar adalah harga mata uang satu negara dalam satuan mata uang lainnya yang biasa disebut dengan *reference currency*. Wikutama (2010) menjelaskan bahwa depresiasi *home currency* memberikan dampak terhadap pinjaman dalam valuta asing karena nilai pinjaman meningkat secara relatif sesuai dengan penurunan tersebut. Peningkatan jumlah kewajiban akan mengakibatkan penurunan kemampuan debitur dalam menyelesaikan pinjaman, bahkan dalam banyak kasus mengakibatkan peningkatan NPL.

Depresiasi *home currency* juga akan mengakibatkan harga barang import (yang secara relatif lebih mahal) dimana hal ini akan memberikan tekanan terhadap *letter of credit* (LC) yang diterbitkan oleh bank komersial untuk *trader* (importir) yang mengakibatkan risiko default semakin meningkat dan dengan meningkatnya risiko default maka kemungkinan peningkatan kredit bermasalah akan semakin besar. sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh positif terhadap NPL.

Sesuai hasil penelitian dari Hermawan Soebagio (2005) bahwa kurs mempunyai pengaruh positif terhadap terjadinya NPL, hal ini berarti kurs (nilai tukar mata rupiah) terhadap mata uang asing (US Dollar) sangat kuat pengaruhnya

terhadap NPL, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut Nilai Tukar (kurs) berpengaruh positif terhadap NPL.

